



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LAKIP)
TA. 2023**

DINAS PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2023 (LAKIP Dinas Perikanan 2023)" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2023 menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Perikanan Tahun 2023. LAKIP ini menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari berbagai sumber anggaran baik APBD Kabupaten Luwu Timur (DAU dan DAK), APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBN, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja Kunci (IKK). Di samping itu, dalam LAKIP ini juga menguraikan tentang keselarasan antara pencapaian sasaran Renstra Dinas dan sasaran Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan sasaran kinerja utama RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan sektor perikanan secara umum di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran dan *stakeholder* terkait lainnya, kondisi ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur sehingga bisa lebih maju dan lebih unggul, ditengah-tengah semakin tingginya tantangan dan permasalahan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Tim Penyusun LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2023, yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diamanahkan sehingga LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami menyadari LAKIP ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan hati, terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang. Akhir kata, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah SWT, semoga LAKIP Dinas Perikanan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang.

Malili, 02 Januari 2024



Dr. Alimuddin Nasir, M.Si
Pemuda Muda (IV/c)
Nip 1961231 198603 1 134

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan terhadap kelompok nelayan, petani tambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021. Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan **Visi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**.

Berkaitan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, wajib melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Realisasi pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan pada pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 yang secara khusus dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Indikator Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, yang sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik, namun data untuk tahun 2023 belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2022.

Sasaran ke-1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan dapat terwujud seiring dengan pencapaian indikator sasaran yaitu Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Jumlah Produksi Perikanan dengan persentase capaian rata-rata di atas 100 persen atau kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah dimana indikator sasaran yang ingin dicapai

yaitu Nilai SAKIP, dimana target untuk tahun 2023 adalah nilai BB dan capaian yaitu nilai BB, dengan kategori penilaian **sangat berhasil**.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 untuk semua sasaran berikut indicator kinerjanya secara umum berhasil. Ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau masih dibawah target, namun secara keseluruhan capaian rata-rata kegiatan cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran tahun 2023 lebih baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Malili, 02 Januari 2024



Dr. Ahmuddin Nasir, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	v
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Diagram.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	2
1. Maksud.....	2
2. Tujuan.....	2
3. Manfaat.....	2
I.3 Gambaran Umum Daerah.....	3
1. Luas dan Batas Wilayah Geografis	3
2. Potensi Perikanan.....	3
3. Gambaran Umum Dinas Perikanan.....	9
I.4 Peran Organisasi.....	11
I.5 Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
II.1 Perencanaan Strategis	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	14
3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 (IKU RPJMD)	15
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	21
III.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	22
III.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2023.....	34
1. Target dan Realisasi Menurut Pendapatan	34
2. Target dan Realisasi Menurut Jenis Belanja	35
III.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi dan Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu.....	37
BAB IV PENUTUP	39
IV.1 Kesimpulan	39
IV. 2 Saran.....	40
Lampiran.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Eselon II.....	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris.....	16
Tabel 2.5.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Tangkap.....	17
Tabel 2.6	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Budidaya	17
Tabel 2.7.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan	17
Tabel 2.8.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	18
Tabel 2.9.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	18
Tabel 2.10.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala UPTD Balai Benih Ikan	19
Tabel 2.11.	Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur T.A. 2022	20
Tabel 3.1.	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II	23
Tabel 3.2.	Perkembangan Capaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2023	24
Tabel 3.3.	Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023	26
Tabel 3.4.	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023	29
Tabel 3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023	30
Tabel 3.6.	Capaian Nilai Lakip Tahun 2023.....	32
Tabel 3.7.	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	34
Tabel 3.8.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	34
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	35
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	35
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Dokumen Perubahan.....	36
Tabel 3.12	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2022	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan 10



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2023	25
Diagram 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2020-2023	26
Diagram 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Perikanan
Tahun 2023
- Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan

Bab 1
Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan subyektif mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2023, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang agroindustri dan ketahanan pangan.

I.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Luas dan Batas Wilayah Geografis

Kabupaten Luwu Timur, memiliki luas wilayah 6.994,88 km² atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" LS dan 119°28'56" - 121°47'27" BT. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

2. Potensi Perikanan

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Jenis komoditi yang dapat dikembangkan merupakan komoditi ekspor dengan potensi produksi skala besar. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang sangat luas dan layak serta dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai yang terdiri dari:

- ❖ Panjang garis pantai : 117,4 Km
- ❖ Luas perairan otonomi : 48.050 Km²
- ❖ Luas Tambak : 12.061,89 Ha

- ❖ Luas Budidaya Rumput Laut : 1.961,50 Ha
- ❖ Luas Budidaya Air Tawar : 590 Ha

Potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur secara umum mencakup Potensi Perikanan Tangkap dan Potensi Perikanan Budidaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Luwu timur yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan 9 (sembilan) sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur melintasi kecamatan. Sungai terpanjang yaitu Sungai Kalaena dengan panjang 85 Km dan yang terpendek Sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Selain itu terdapat 5 (lima) danau alami yang sangat indah dan dipertahankan kealamiannya yaitu Danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Taparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lontoa (1,71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan 4 (empat) danau lainnya tersebar di Kecamatan Towuti. Berikut perkembangan perikanan di Kabupaten Luwu Timur :

a. Potensi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan potensi lahan yang layak untuk budidaya sangat luas. Tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30 % dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.

Adapun potensi perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi :

✚ Potensi Perikanan Budidaya di Air Laut

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kawasan budidaya laut yang cukup besar di wilayah perairan teluk

Bone, dengan garis pantai 117,4 km sepanjang pesisir Kec. Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Kondisi perairan laut yang masih alami dan tidak mengalami pencemaran merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan potensi budidaya laut di wilayah ini. Komoditi unggulan yang dapat dikembangkan antara lain :

1) Komoditi Teripang dan Lobster

Teripang dan Lobster sebagai salah satu komoditi ekspor di Kabupaten Luwu Timur belum dikelola dengan baik oleh para nelayan di Kabupaten Luwu Timur karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penangkapan maupun budidaya Lobster Laut. Untuk itu, perlu menjaga kelestarian ekosistem teripang dan lobster di Bumi Batara Guru dari aktivitas penangkapan secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab.



2) Komoditi Rumput Laut *Euchema Cottonii*

Budidaya rumput laut *Euchema Cottonii* merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan di kawasan perairan Teluk Bone sepanjang pantai pesisir Kabupaten Luwu Timur khususnya di perairan Kec. Burau sampai pantai Wotu. Luas Lahan untuk pengembangan rumput laut *Euchema Cottonii* di Bumi Batara guru mencapai **1.961,5 Ha** dengan kisaran produksi **26.403 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **13.46 kg/Ha**.



✚ Potensi Perikanan Budidaya Air Payau

Produksi perikanan budidaya air payau atau tambak di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan tambak untuk budidaya yang cukup luas mencapai 12.061,89 Ha.

1) Komoditi Rumput Laut *Gracillaria* sp

Komoditi Rumput laut *Gracillaria* sp merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil dikembangkan dan dibudidayakan. Potensi Pengembangan Rumput Laut *Gracillaria* sp di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas 11.681,89 **Ha** dengan kisaran produksi mencapai **18.538,75 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **4.500 kg/Ha kering**.



2) Komoditi Ikan Bandeng

Ikan Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang saat ini menempati peringkat terbaik di Propinsi Sulawesi Selatan. Komoditi ini dibudidayakan pada 4 (empat) wilayah kecamatan pesisir untuk memenuhi kebutuhan domestik dan daerah lainnya

baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Potensi Pengembangan Ikan Bandeng di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **14.644,6 ton per tahun** pada tingkat produktivitas rata-rata **1.214 kg/Ha**.



3) Komoditi Udang Windu/Vanamae

Udang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan oleh masyarakat dengan potensi usaha yang cukup baik serta segmentasi pasar yang sangat tinggi. Secara umum jenis udang yang paling banyak dikembangkan oleh para pembudidaya adalah Udang Windu dan Udang Vanamae. Terdapat juga udang laci-laci dan udang Galah.

Luas lahan untuk pengembangan budidaya udang di Bumi Batara Guru mencapai **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi sebesar **3.391,01 ton/tahun** pada tingkat produktivitas **750 kg/Ha**.



✚ Budidaya Air Tawar

Potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang melimpah dan layak bersumber dari sungai, irigasi dan danau. Potensi lahan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Kolam Air Tawar

Budidaya ikan dengan kolam air tawar merupakan salah satu metode budidaya yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di seluruh kecamatan. Komoditi ikan yang umum dikembangkan adalah Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Gurami dan Ikan Bawal yang dibudidayakan untuk menyuplai kebutuhan domestik maupun kebutuhan luar daerah.



b. Potensi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar daerah. Adapun potensi perikanan tangkap yang dominan berasal dari jenis ikan pelagis kecil seperti tembang, teri, kembung, dll. Lokasi perikanan tangkap tersebar di 4 (empat) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Malili, Angkona, Wotu dan Bauru. Komoditas yang dihasilkan dari aktifitas penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap musim dapat menghasilkan

produksi yang cukup tinggi. Data Perikanan Tangkap Tahun 2023 menunjukkan:

- 1) Jumlah RTP Nelayan 1.982 RTP
- 2) Jumlah Alat tangkap terdiri dari Jaring Insang, Pukat Tarik/Pukat Pantai, Pancing Tonda, Bagang Apung, Purse Seine dan Rawai Dasar, Sero, Rakkang/Perangkap, Bubu, Payang, dan Anco.
- 3) Jenis Ikan yang tertangkap :
 - Pelagis besar: Tongkol, Cakalang, dan Tenggiri
 - Pelagis kecil : Layang, Kembung, Teri, dan Belanak
 - Demersal : Cucut, Kerapu, Kakap, Bawal dan Baronang
- 4) Armada :
 - ✓ Perahu tanpa motor : 37 unit
 - ✓ Perahu bermotor : 1.920 unit
 - ✓ Kapal Motor : 57 unit



3. Gambaran Umum Dinas Perikanan

Susunan Organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat yang didukung oleh dua sub bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perikanan Budidaya yang didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Perikanan Tangkap didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur hingga akhir tahun anggaran 2023 sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- 1) Pejabat Struktural berjumlah 8 Orang dengan rincian :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 3 orang
- 2) Staf berjumlah 9 orang dengan rincian :
 - Golongan IV : 1 Orang
 - Golongan III : 7 Orang
 - Golongan II : 1 Orang
- 3) Fungsional berjumlah 7 Orang

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan



I.4 PERAN ORGANISASI

Tugas Pokok Dinas Perikanan secara umum berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 yakni membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

I.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan selama ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi baik dari aspek ekonomi global maupun isu dunia tentang lingkungan, maka dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- a. Permintaan pasar dunia akan komoditi perikanan lebih diutamakan dari komoditi budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya;
- b. Komoditi hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode, teknik dan alat yang digunakan karena hal ini dipantau oleh Uni Eropa;

- c. Menurunnya kualitas sumberdaya perikanan sebagai akibat dari *Illegal fishing* dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan lahan usaha;
- d. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut relative masih terbatas, demikian juga dengan usaha penangkapan ikan sehingga produksi dan produktivitas masih terbatas;
- e. Pasca panen hasil perikanan belum dikelola secara optimal; dan
- f. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sehingga masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi atau manufaktur dengan pembangunan perikanan.

Tantangan utama pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah Mewujudkan Target Kinerja RPJMD 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan Kegiatan Prioritas (KP 1) yaitu :

1. Pemberian benih unggul serta sarana dan penunjangnya
 - Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia 100 Kelompok
 - Jumlah Jembatan tambak yang dibangun 15 Unit
 - Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun 20 Km
2. Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan (75 Kelompok)
3. Pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan (25 Kelompok)

Bab II

Perencanaan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan actual/kekinian dari masyarakat sarasannya, yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan factor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentangi di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran perencanaan tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya.**

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi. Adapun tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Peningkatan jumlah armada/kapal penangkap ikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap; 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan; 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan; 5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan; 6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur; 7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 8. Pembinaan SPDN.
			2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI); 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana budidaya perikanan; 3. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan; 4. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan; 5. Penyediaan data kelautan dan perikanan; dan 6. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau.

			3. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan	1. Peningkatan sarana prasarana unit pengolahan ikan (UPI); 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan; 3. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 4. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan; dan 5. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART

3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 (IKU RPJMD)

Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Tahun 2023 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 :
Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2023
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha yang dirilis oleh BPS	Juta Rupiah	665,289
2	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Ton	325,926

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan

antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Lampiran : Perjanjian kinerja eselon II

Tabel 2.3 : Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	665.289 Juta Rupiah
		Produksi Perikanan	325.926 Ton
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	71

Tabel 2.4 : Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan adminstrasi perkantoran	100 Persen
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen
		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen
		Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar	100 Persen
		Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan pendapatan perangkat daerah	100 Persen
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen

Tabel 2.5 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Tangkap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	10.216 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	94 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	71 Persen
VI	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen

Tabel 2.6 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Budidaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	315.710 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	90 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen

Tabel 2.7 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan	355 Ton
II	Tersedianya Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen

III	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen
IV	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	64 Persen

**Tabel 2.8 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen
II	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
III	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen
IV	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	26 Orang
V	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen

**Tabel 2.9 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung, Bangunan Kantor lainnya, Kendaraan Dinas, Peralatan dan mesin yang diadakan dan di pelihara serta dibayarkan pajaknya	36 Unit
		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 Rekening
II	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	18 Jenis
		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang

III	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
IV	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
V	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2.000 Surat
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	230 Kali
VI	Meningkatnya Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah ASN yang mengikut bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	6 Orang
VII	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	4 Jenis
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksampler
		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	332 Orang

Tabel 2.10 : Perjanjian kerja eselon IV
Kepala UPTD Balai Benih Ikan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	90.000 Ekor

Program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2023 yang disajikan pada tabel di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjelaskan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Total anggaran untuk membiayai pelaksanaan RKT Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 : Anggaran Belanja Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu Timur T.A. 2023

No	Jenis Anggaran Belanja	Target (Rp)
1	BELANJA OPERASI	21,660,608,200
1	01 Belanja Pegawai	3,108,093,990
1	02 Belanja Barang dan Jasa	18,552,514,210
1	05 Belanja Hibah	
2	BELANJA MODAL	2,239,230,000
2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775,830,000
2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	864,000,000
2	04 Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi	599,400,000
	JUMLAH	23,899,838,200



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis (IKU Renstra) yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan realiasi tolak ukur kinerja dengan target indikator kinerja kegiatan yang meliputi : *input*, *output*, dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator program dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target realisasi indikator program. Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan terdiri dari :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 2) Penetapan Kinerja (PK);
- 3) Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK);
- 4) Pengukuran Pencapaian Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (*input*, *output* dan *outcome*); dan
- 5) Analisis Efisiensi dan Efektifitas;

III.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Hasil Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran, diperoleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

$x \geq 85$: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
$x < 55$: Kurang berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 :
Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah)	665.289	658.624	99	Sangat Berhasil
		Produksi Perikanan (Ton)	325.926	389.369,70	119,47	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip (Angka)	71	*75,95	106,97	Sangat Berhasil

Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang ditetapkan, rata-rata capaian di atas 100% sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja :

- a. *Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan.* Indikator kinerja nilai PDRB sub sektor perikanan merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa sektor perikanan yang diproduksi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 (satu) tahun tertentu sebagai tahun dasar.

b. *Produksi Perikanan*. Indikator kinerja produksi perikanan merupakan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan.

Indikator 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Data BPS Kabupaten Luwu Timur sebesar 658.624 Juta Rupiah atau setara 658.624 Milyar atau 99 % terhadap target 665.289 Juta Rupiah yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka mengalami penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 3.172 Juta Rupiah atau -0,48 %. Hal ini disebabkan adanya penurunan harga salah satu komoditi perikanan yaitu rumput laut sehingga nilai tambah barang dan jasa menjadi berkurang.

Tabel 3.2 :
Perkembangan Capaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan			
Indikator Kinerja 1			Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan			
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra
			Target	Realisasi	% Capaian	
636.794,66	635.189,74	661.796,08	665.289	658.624	99	675.323

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

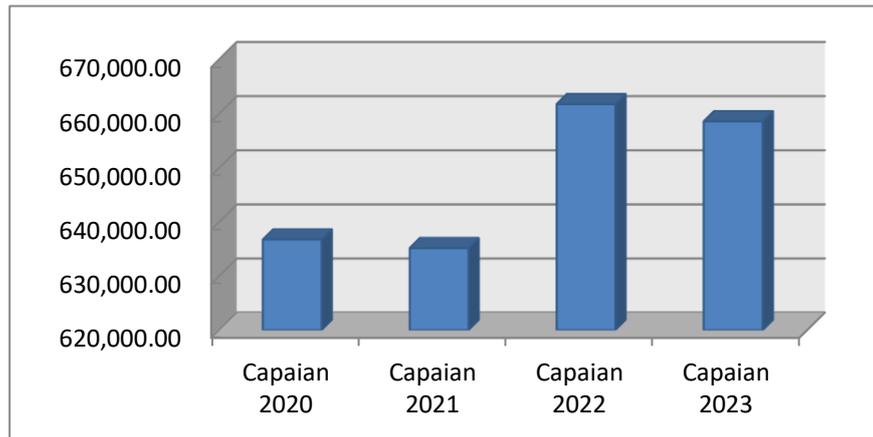


Diagram 3.1 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2023

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan. Salah satu pemicu sehingga Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan meningkat karena adanya peran serta Pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang salurkan kemasayarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam renstra, Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa target akhir jangka menengah Renstra sebesar 675.323 Juta Rupiah, sedangkan realisasi Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan sampai tahun 2023 sebesar 658.624 Juta Rupiah, artinya masih ada capaian yang harus dicapai sebesar 16.699 Juta Rupiah.

Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan

selama 1 (Satu) tahun yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan

Tabel 3.3 :
Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan					
Indikator Kinerja 1			Produksi Perikanan					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Standar Provinsi	Standar Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian			
325.355	325.622	329.212,0 ₉	325.926	389.369,70	119,47	326.122	1.316.708	6.660.000

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2023 sebesar 389.369,70 Ton atau 119,47 % terhadap target 325.926 Ton yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka mengalami peningkatan sebesar 60.157,61 Ton atau 18,27 %. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi dari segi budidaya perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga terjadi peningkatan produksi.

Perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

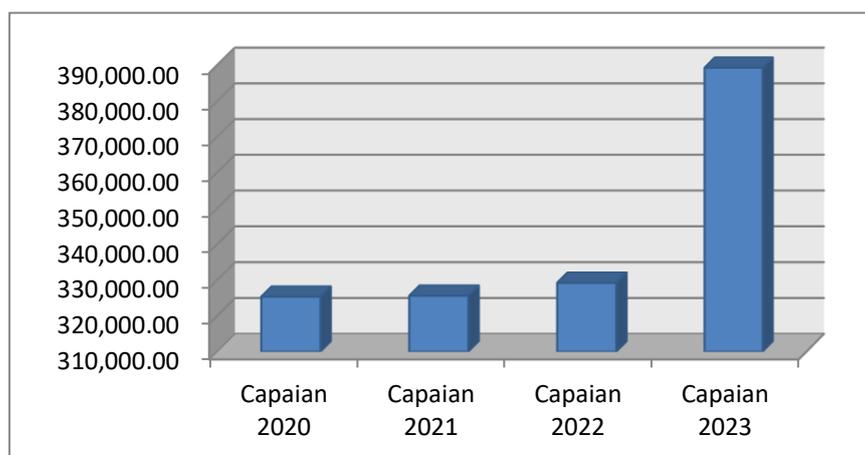


Diagram 3.2 :
Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2020-2023

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 (dua) Jumlah Produksi Perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan kemasyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan akan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar.

Perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target jangka menengah Renstra sebesar 326.122 Ton, sedangkan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 389.369,70 Ton, artinya sudah melebihi dari target yang ada di Renstra.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan target Provinsi dan Nasional Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 25 % terhadap target pencapaian produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pencapaian target nasional, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 4,94%.

Dalam pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan**, dihadapkan dengan adanya keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, maka dari itu kami mencoba untuk melakukan Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan yaitu :

a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk

memfokuskan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2023, juga tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian bagi kelompok tani ikan dan nelayan.

b. Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran dari level sub kegiatan, kegiatan sampai program, maka di tahun 2023 ini tidak ada yang dianggap gagal, hanya saja ada yang pencapaiannya di bawah 80 persen. Ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan seluruh *stakeholder* unit-unit yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja dan pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat.

c. Hambatan/Masalah yang dihadapi Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Keterbatasan modal dan masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan sehingga tidak mampu melakukan penambahan dan perbaikan kapal;
- 2) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alasan menjadi nelayan adalah profesi jalan terakhir atau tidak menjanjikan;
- 3) Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal; dan
- 4) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan.

d. Strategi/Alternatif Solusi yang dilakukan untuk Memecahkan Masalah

- 1) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alternatif solusi dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan, pendampingan sertifikasi lahan nelayan, pembinaan desa pesisir dan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap; dan

2) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspose produk perikanan.

Upaya pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan** didukung oleh 3 (tiga) program yang dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 :
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	10.216 Ton	10.373 Ton	101,53 %
	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	315.710 Ton	378.996,70 Ton	120,05%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Pengolahan Ikan	322 Ton	564,46 Ton	175,29 %

Penghitungan nilai tambah sub kategori perikanan atau yang disebut juga dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Adapun pencapaian pembangunan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 10.373ton, meningkat 1,03% jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 10.267,5 ton.Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 10.373 ton terdiri dari produksi perairan laut sebesar 10.126 ton dan produksi perairan danau

sebesar 247 ton. Produksi perikanan tangkap di laut didominasi oleh 5 (lima) jenis ikan yakni Tongkol, Tembang, Layang, Teri dan Kembung.

PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 378.996,70 ton, meningkat 18,83 % jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 318.944,59 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 378.996,70 ton, terdiri dari produksi perikanan budidaya laut sebesar 211.221,40 ton, produksi perikanan budidaya tambak sebesar 166.735,35 ton, dan produksi perikanan budidaya kolam sebesar 1.040 ton. Total produksi perikanan budidaya tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) komoditas perikanan budidaya diantaranya Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*), Rumput Laut (*Gracilaria*) Bandeng (*Chanos chanos*), Lele (*Clariidae*), Udang (*Caridea*) dan Nila (*Oreochromis niloticus*).

Tabel 3.5 :
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	99 %	96,73 %	2,27 %
	Produksi Perikanan	119,47 %	96,73 %	22,74 %

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel di atas, pencapaian sasaran strategis Produktivitas Sektor Perikanan untuk indikator Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,27 %. Sedangkan indikator Produksi Perikanan dengan persentase

capaian kinerja sebesar 119,47 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,74 %.

Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023 sebagai berikut :

✚ Bidang Perikanan Tangkap



Kamis, 28 Desember 2023 14:00:33
2.636814429424703S 120.7232214231044E
Mabonta
Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur
Sulawesi Selatan
tambatan perahu



Pembangunan Tambatan Perahu dan Bantuan Sarana Alat Tangkap bagi Nelayan

✚ Bidang Perikanan Budidaya



Jalan Tanpa Nama
Lakawali Pantai
Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur
Sulawesi Selatan
29 Nov 2023 14.08.16



2.6497, 120.65788, 70.4m, 262°
16 Nov 2023 06.52.50

Pembangunan Jalan Produksi dan Jembatan Tambak bagi Pembudidaya Ikan



2.639415958, 120.600602E
260° W
Lioka
Kecamatan Towali
Kabupaten Luwu Timur
Sulawesi Selatan
Altitude: 23.37m
Speed: 0.0km/h
Penyerahan Bantuan Sapihudi Ikan Air Tawar Kip, Sangarua
Telp number: 496
Rabu, 13 Desember 2023 13:01:11



Jalan Perba
Lakawali Pantai
Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur
Sulawesi Selatan

Bantuan Benih Unggul dan sarana pendukungnya bagi Pembudidaya Ikan

2. SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tabel 3.6 :
Capaian Nilai Lakip Tahun 2023

Sasaran Strategis 2			Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah			
Indikator Kinerja			Nilai Lakip			
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra
			Target	Realisasi	% Capaian	
65,75	71,39	75,95	71	75,95	106,97	81

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perikanan mendapatkan nilai **75,95**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka angkanya sama dengan tahun 2023 karena sampai saat ini Tim Penilai AKIP masih dalam tahap penilaian. Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan. Ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stakeholder* di lingkup Dinas Perikanan yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

Capain kinerja Nilai Lakip selama (empat) tahun terakhir digambarkan pada diagram dibawah ini:

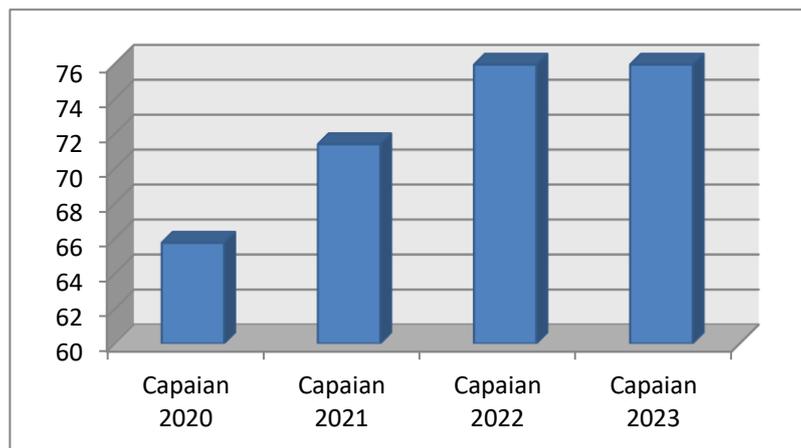


Diagram 3.3 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023

Perbandingan capaian kinerja Nilai Lakip tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam renstra, yaitu berdasarkan target akhir jangka menengah Nilai Lakip yang harus dicapai yaitu 81 sedangkan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 75,95. Artinya masih ada nilai yang harus dicapai sebesar 5,05.

Adapun upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyesuaian sistem perencanaan; penganggaran dan informasi kinerja; sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja; partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan monitoring kinerja serta penyusunan laporan kinerja; peningkatan budaya kinerja; pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah; pengintegrasian system anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi serta pegawai berbasis teknologi informasi.

Upaya pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah** didukung oleh 1 (satu) program yang dirincikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 :
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	100 %	101,93 %	101,93 %

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,93 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisieni penggunaan sumber daya sebesar 5,2 %. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 :
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Nilai Lakip	101,93 %	96,73 %	5,2 %

III.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

1. Target dan Realisasi Menurut Jenis Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 :
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Persen
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Penyewaan Tanah dan bangunan (Sewa Gedung Rumput laut, Sewa Pabrik Es, Sewa Pabrik rumput laut dan Sewa SPDN	180.000.000	10.000.000	5,56
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (retribusi penjualan Balai Benih Ikan)	100.000.000	25.510.000	25.51
	Jumlah	280.000.000	35.510.000	12.68

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pendapatan Dinas Perikanan pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan tidak mencapai target disebabkan pihak ketiga yang menyewa Pabrik rumput laut belum mampu menyetorkan biaya sewa sebagaimana dalam surat penetapan dikarenakan pihak penyewa mengalami kendala keuangan, ada juga yang telah putus kontrak. Sedangkan Pendapatan pada sektor Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak mencapai target disebabkan Pemasaran yang belum optimal serta kondisi alam yang menyebabkan kurangnya benih ikan yang dihasilkan sehingga retribusi penjualan produksi usaha daerah tidak mencapai target.

2. Target dan Realisasi Menurut Jenis Belanja

Target dan Realisasi belanja Dinas Perikanan dan dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.10 :
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA DAERAH	23.899.838.200	23.117.207.928,37	96.73
1	Belanja Operasi	21,660,608,200	20.924.587.301,80	96.60
	Belanja Pegawai	3.108.093.990	2.777.168.924	89.35
	Belanja Barang dan Jasa	18.552.514.210	18,147,418,377.80	97.82

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Belanja Hibah	-	-	-
2	Belanja Modal	2.239.230.000	2.192.620.626,57	97.92
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775.830.000	734.919,000	94.73
	Belanja Gedung dan Bangunan	864,000,000	859.241.834,87	99.45
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	599.400.000	596.459.791,70	99.84

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi belanja Dinas Perikanan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.23.899.838.200. Realisasi sebesar Rp.23.117.207.928,37 atau 96.73 % yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai serta Belanja barang dan Jasa) dengan total anggaran Rp.21.660.608.200 dan terealisasi Rp.20.924.587.301,80 atau 96.60%, dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi) dengan total anggaran Rp.2.239.230.000 dan terealisasi Rp. 2.192.620.626,57 atau 97.92 %.

Objek Belanja Dinas Perikanan berupa pelaksanaan dari 5 (lima) program yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun dan mengalami perubahan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 :
Realisasi Anggaran Program berdasarkan Dokumen Perubahan

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.960.017.690	5.562.757.690	5.154.592.473.	92,66%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.382.510.000	9.092.610.000	9.049.070.766,69	99,52%

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.684.592.530	8.189.648.530	8.078.105.335,68	98,64%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	78.407.500	78.407.500	78.243.800	99,79%
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pangan	926.414.480	976.414.480	757.195.553	77,55%

Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2023 Dinas Perikanan pada Anggaran Perubahan melaksanakan 5 (lima) Program dengan jumlah anggaran Belanja Rp.23,899,838,200. Ada penambahan pada anggaran belanja sebesar Rp.9.867.896.000 yang digunakan untuk mengurangi dampak inflasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa benih unggul serta sarana dan penunjangnya, sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan yang menggunakan Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja, serta pengadaan mobil dinas operasional 1 (satu) unit.

III.4 TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PERBAIKAN-PERBAIKAN TAHUN LALU

Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada Tahun 2022 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.12 :
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Melakukan analisis terhadap factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja dan target kinerja di buat menantang tetapi realistis untuk dicapai	Telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja dan target kinerja	Akan dilakukan perubahan pada saat penyusunan Renstra terbaru

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
2.	Membuat perjanjian kinerja sampai pada level staf, dan evaluasi kinerja berjenjangjuga sampai pada level staf, sehingga Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara dari level staf sampai pimpinan	Membuat perjanjian kinerja sampai pada level staf, dan evaluasi kinerja berjenjangjuga sampai pada level staf	Telah membuat perjanjian kinerja sampai pada level eselon IV dan untuk staf menggunakan SKP sesuai arahan kementerian PAN RB pada saat <i>Coaching Clinic</i>
3.	Agar seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan	Memberikan arahan keseluruhan pegawai lingkup Dinas Perikanan agar lebih memahami kinerja yang telah direncanakan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas	Disampaikan pada saat Rapat Evaluasi Interen di setiap Triwulan
4.	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja memanfaatkan teknologisehingga informasi kinerja yang disampaikan lebih akurat dan <i>update</i>	Telah melakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang memanfaatkan teknologisehingga informasi kinerja yang disampaikan lebih akurat dan <i>update</i>	Melakukan kerja sama dengan BPS Kabupaten Luwu Timur terkait dengan data produksi perikanan
5.	Membuat kebijakan Perkada/Perbub tentang pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja	Akan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait	Telah dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi
6.	Membuat kebijakan terkait pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (BKPSDM)	Akan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait	Telah dikoordinasikan dengan BKPSDM
7.	Pengukuran kinerja seharusnya mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>) Organisasi	Akan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait	Telah dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi
8.	Pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk mempengaruhi penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Akan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait	Telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas



Bab IV

Penutup



BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam LAKIP tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 untuk semua sasaran strategis berikut indikator kerjanya secara umum cukup bagus. Dengan demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan telah terwujud. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, persentase capaian realisasi indikator kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan sebesar 99 %, indikator kinerja Produksi Perikanan mencapai 119,47 %, dan indikator kinerja Nilai Lakip mencapai 106,97 %.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan Tahun 2023 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 96,73 %, sedangkan untuk kinerja sebesar 99,59 %. Dukungan keuangan/pendanaan dari APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 sangat membantu untuk mengoptimalkan pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi perbandingan pencapaian sasaran/indikator selama Tahun 2021-2026 terhadap target sasaran/indikator kinerja RENSTRA selama 5 (lima) Tahun (2021-2026) secara umum tercapai sangat baik, proporsional dan diharapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu penetapan program dan kebutuhan prioritas yang terkadang tidak berkesesuaian dengan kesiapan anggaran, aparatur teknis lapangan dan pengelola yang belum mencukupi, kapasitas aparatur yang belum proporsional dan tidak ter-*update*, serta pemetaan potensi kelautan dan perikanan yang belum lengkap.

IV.2 SARAN

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Mengusulan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan;
3. Perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan
4. Perlu dilakukan pemetaan potensi kelautan dan perikanan baik secara manual maupun digital melalui metode pemetaan GIS (*Geographical Information System*) atau metode lainnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya, sebagaimana fungsi pokok dan tujuan dari penyusunan LAKIP.

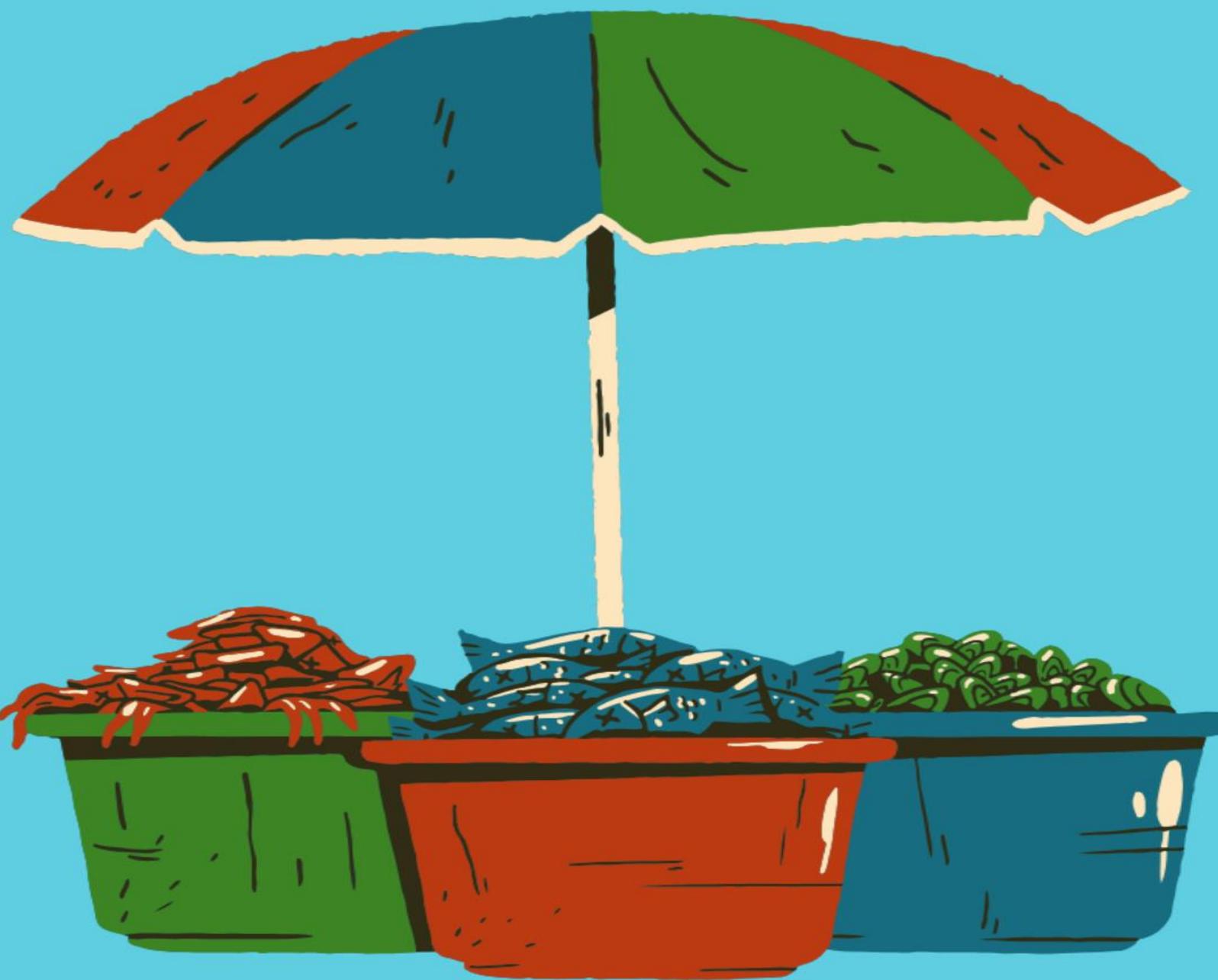
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, yang merupakan wujud peran serta Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung Penguatan Otonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 02 Januari 2024



DR. AHMAD MUJIBUDIN MASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19651231 198603 1 134

Lampiran



FORMAT 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN					NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN/KENDALA
								(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (8-9)	12 (11/8*100)	13	14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	100	101.93	-	-	5,562,757,690.00	5,154,592,473.00	92.66%	408,165,217.00	7.34%	-	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (Persen)	100	100	-	-	109,199,500.00	106,724,970.00	97.73%	2,474,530.00	2.27%	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	2	2	-	-	38,395,500.00	36,313,300.00	94.58%	2,082,200.00	5.42%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	-	-	4,728,000.00	4,648,000.00	98.31%	80,000.00	1.69%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	-	-	5,918,000.00	5,831,900.00	98.55%	86,100.00	1.45%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	10	-	-	60,158,000.00	59,931,770.00	99.62%	226,230.00	0.38%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (Persen)	100	94.26	-	-	3,111,387,990.00	2,780,100,524.00	89.35%	331,287,466.00	10.65%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang dibayarkan (Orang)	26	26	-	-	3,023,013,990.00	2,692,088,924.00	89.05%	330,925,066.00	10.95%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	18	18	-	-	88,374,000.00	88,011,600.00	99.59%	362,400.00	0.41%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	100	-	-	41,998,000.00	41,925,100.00	99.83%	72,900.00	0.17%	-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	-	-	41,998,000.00	41,925,100.00	99.83%	72,900.00	0.17%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	100	12.68	-	-	13,203,900.00	13,098,950.00	99.21%	104,950.00	0.79%	-	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4	100	-	-	13,203,900.00	13,098,950.00	99.21%	104,950.00	0.79%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	142.12	-	-	153,342,000.00	142,665,045.00	93.04%	10,676,955.00	6.96%	-	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Dokumen)	12	12	-	-	63,532,000.00	63,186,095.00	99.46%	345,905.00	0.54%	-	Handayani, S,AN
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	7	15	-	-	89,810,000.00	79,478,950.00	88.50%	10,331,050.00	11.50%	Belanja yang tersisa adalah belanja kontribusi bimtek karena acara bimtek yang diikuti ditanggung oleh pihak penyelenggara.	Handayani, S,AN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	100	101.68	-	-	816,954,300.00	805,010,193.00	98.54%	11,944,107.00	1.46%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	10	10	-	-	6,864,000.00	6,855,000.00	99.87%	9,000.00	0.13%	-	Handayani, S,AN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN						NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA	
								(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (8-9)	12 (11/8*100)	13	14
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	102	102	-	-	257,330,000.00	245,719,000.00	95.49%	11,611,000.00	4.51%	-	Mahmuddin Mahading, S.Pi
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	20	20	-	-	10,685,500.00	10,680,000.00	99.95%	5,500.00	0.05%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	7	7	-	-	10,070,000.00	9,754,500.00	96.87%	315,500.00	3.13%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	48	48	-	-	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%	-	0.00%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang)	332	332	-	-	13,220,000.00	13,220,000.00	100.00%	-	0.00%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kali)	230	230	-	-	513,684,800.00	513,681,693.00	100.00%	3,107.00	0.00%	-	Handayani, S.AN
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (Persen)	100	100	-	-	517,500,000.00	488,200,000.00	94.34%	29,300,000.00	5.66%	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (Unit)	1	1	-	-	512,500,000.00	484,000,000.00	94.44%	28,500,000.00	5.56%	-	Mahmuddin Mahading, S.Pi
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (Unit)	2	2	-	-	5,000,000.00	4,200,000.00	84.00%	800,000.00	16.00%	-	Mahmuddin Mahading, S.Pi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	100	231.63	-	-	254,000,000.00	243,351,430.00	95.81%	10,648,570.00	4.19%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2000	4738	-	-	3,500,000.00	3,464,600.00	98.99%	35,400.00	1.01%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	10	10	-	-	85,500,000.00	74,886,830.00	87.59%	10,613,170.00	12.41%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	10	10	-	-	165,000,000.00	165,000,000.00	100.00%	-	0.00%	-	Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (Persen)	100	100	-	-	545,172,000.00	533,516,261.00	97.86%	11,655,739.00	2.14%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	23	23	-	-	173,522,000.00	163,714,000.00	94.35%	9,808,000.00	5.65%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	40	40	-	-	23,450,000.00	23,260,000.00	99.19%	190,000.00	0.81%	-	Handayani, S.AN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	6	-	-	348,200,000.00	346,542,261.00	99.52%	1,657,739.00	0.48%	-	Handayani, S.AN
02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	10216	10373.1	-	-	9,092,610,000.00	9,049,070,766.69	99.52%	43,539,233.31	0.48%	-	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	100	-	-	8,873,704,630.00	8,835,623,942.00	99.57%	38,080,688.00	0.43%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (Dokumen)	4	4	-	-	63,104,630.00	62,929,130.00	99.72%	175,500.00	0.28%	-	A. Muh. Muzakkir, S.Kel.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN					NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN/KENDALA
								(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (8-9)	12 (11/8*100)	13	14
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab (Unit)	1	1	-	-	199,700,000.00	197,573,377.00	98.94%	2,126,623.00	1.06%	-	A. Muh. Muzakkir, S.Kel.
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (Kelompok) (KP 1)	60	60	-	-	8,610,900,000.00	8,575,121,435.00	99.58%	35,778,565.00	0.42%	-	Tri Wiyanto Achadi, S.Pi.
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	99.99	-	-	158,905,370.00	154,056,300.00	96.95%	4,849,070.00	3.05%	-	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (Orang)	40	40	-	-	42,065,370.00	41,850,900.00	99.49%	214,470.00	0.51%	-	A. Muh. Muzakkir, S.Kel.
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (Kelompok)	25	25	-	-	116,840,000.00	112,205,400.00	96.03%	4,634,600.00	3.97%	-	A. Muh. Muzakkir, S.Kel.
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	71	71.42	-	-	60,000,000.00	59,390,524.69	98.98%	609,475.31	1.02%	-	
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok TPI yang dibangun/rehab (Unit)	1	1	-	-	60,000,000.00	59,390,524.69	98.98%	609,475.31	1.02%	-	A. Muh. Muzakkir, S.Kel.
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	315710	378996.63	-	-	8,189,648,530.00	8,078,105,335.68	98.64%	111,543,194.32	1.36%	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	99.99	-	-	424,780,640.00	405,949,220.00	95.57%	18,831,420.00	4.43%	-	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	27	27	-	-	24,517,695.00	21,787,125.00	88.86%	2,730,570.00	11.14%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan (Persil)	50	50	-	-	34,240,445.00	33,564,100.00	98.02%	676,345.00	1.98%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I (Kelompok)	27	27	-	-	366,022,500.00	350,597,995.00	95.79%	15,424,505.00	4.21%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	84.07	-	-	7,764,867,890.00	7,672,156,115.68	98.81%	92,711,774.32	1.19%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (Dokumen)	4	4	-	-	63,373,215.00	63,207,000.00	99.74%	166,215.00	0.26%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab (Unit)	1	1	-	-	1,266,000,000.00	1,263,133,267.28	99.77%	2,866,732.72	0.23%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
		Jumlah jembatan tambak yang disediakan (Unit) (KP 1)	3	3	-	-						-	
		Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	4	4.43	-	-						-	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (Kelompok) (KP 1)	96	95	Terdapat 1 (satu) kelompok calon penerima bantuan yang tidak kooperatif dalam pemenuhan kelengkapan berkas administrasi lainnya.	Lebih selektif pada saat verifikasi calon penerima bantuan, baik itu dari segi proposal, kelengkapan administrasi lainnya dan kesiapan lahan penerima bantuan.	6,081,040,000.00	5,998,920,628.40	98.65%	82,119,371.60	1.35%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender (Orang)	30	30	-	-	73,504,875.00	73,358,620.00	99.80%	146,255.00	0.20%	-	Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN					NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN/KENDALA
								(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (8-9)	12 (11/8*100)	13	14
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (Ekor)	90000	75640	-	-	280,949,800.00	273,536,600.00	97.36%	7,413,200.00	2.64%	-	Hariani Kanda, S.PI
04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (Persen)	94	100	-	-	78,407,500.00	78,243,800.00	99.79%	163,700.00	0.21%	-	
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	100	-	-	78,407,500.00	78,243,800.00	99.79%	163,700.00	0.21%	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (Kali)	24	24	-	-	78,407,500.00	78,243,800.00	99.79%	163,700.00	0.21%	-	A. Muh. Muzakir, S.Kel.
05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN (TON)	335	564.46	-	-	976,414,480.00	757,195,553.00	77.55%	219,218,927.00	22.45%	-	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	100	-	-	264,879,480.00	239,460,331.00	90.40%	25,419,149.00	9.60%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (Dokumen)	4	4	-	-	264,879,480.00	239,460,331.00	90.40%	25,419,149.00	9.60%	-	Ilaikal Masir, S.St.PI
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	100	-	-	137,295,000.00	132,870,490.00	96.78%	4,424,510.00	3.22%	-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (Kali)	6	6	-	-	137,295,000.00	132,870,490.00	96.78%	4,424,510.00	3.22%	-	Ilaikal Masir, S.St.PI
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	64	75	-	-	574,240,000.00	384,864,732.00	67.02%	189,375,268.00	32.98%	-	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Kelompok)	4	3	Mesin pengering yang diusulkan kelompok calon penerima tidak cocok digunakan untuk mengeringkan rumput laut. Selain itu spesifikasi alat tersebut hanya cocok digunakan untuk mengeringkan cocoa (cokelat).	Lebih selektif pada saat verifikasi calon penerima bantuan, baik itu dari segi proposal dan kelengkapan administrasi lainnya.	574,240,000.00	384,864,732.00	67.02%	189,375,268.00	32.98%	Terdapat 1 (satu) paket belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yang tidak dicairkan karena bantuan yang diusulkan kelompok calon penerima tidak sesuai spesifikasi untuk pengolahan ikan.	Ilaikal Masir, S.St.PI
TOTAL BELANJA			100	99.59			23,899,838,200.00	23,117,207,928.37	96.73%	782,630,271.63	3.27%		

Malili, 31 Desember 2023
KEBUPATIHAN MALILILAH
PANGKALBENDU
MUDA
NIP. 19651231198803 1 134

Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan

BIDANG PERIKANAN TANGKAP



Pendataan Statistik



Pembangunan Tambatan Perahu Pantai Lemo



Penyerahan Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan Tangkap



Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan



Pendampingan Kelompok Perikanan Tangkap dan Sosialisasi Penginputan Dokumen Kapal Nelayan Sistem Online



Rehabilitasi TPI Ussu



Sosialisasi serta Gerai Pengurusan Dokumen Kapal 0-20 GT dan Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



Sosialisasi Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik bagi Pembudidaya



Sosialisasi Aplikasi Probiotik pada Lokasi Budidaya Ikan/Undang



Penyuluhan Kegiatan Sertifikasi Lahan Pembudidaya Ikan



Sosialisasi Pembinaan Perempuan Kelompok Pengikat Bibit Rumput Laut



Sosialisasi Budidaya Polikultur pada Kelompok Pembudidaya



Pendataan Statistik Bidang Perikanan Budidaya



Jalan Produksi dan Jembatan Tambak Pembudidaya yang dibangun



Penyerahan Bantuan Benih Unggul serta Sarana Pembudidaya Ikan



Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

BIDANG DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN



Pendataan Statistik Pengolahan Hasil Perikanan



Pelatihan Inovasi Pengolahan Hasil Perikanan



Sosialisasi Gemar Makan Ikan sebagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting



Penyerahan Bantuan Sarana Pengolahan Ikan dan Pembangunan Lantai Jemur Rumpus Laut

 **UPTD BALAI BENIH IKAN**



Persiapan untuk pemijahan bibit ikan